

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi merupakan suatu wadah kegiatan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang bekerja atas dasar relatif dan dapat diidentifikasi untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan tertentu. Pelaksanaan aktivitas yang berada dalam sebuah organisasi baik instansi pemerintah maupun swasta akan selalu berusaha mencapai hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu tujuan dalam organisasi tidak dapat dicapai oleh individu yang bekerja sendiri namun akan lebih efisien apabila melalui hasil usaha kelompok. Dalam organisasi diperlukan suatu pengawasan internal dimana tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk mengurangi hambatan yang akan terjadi serta untuk mempermudah dalam proses pencapaian efektivitas kerja yang optimal.

Menurut Siagian (2005:125), pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan yang dilakukan dari seluruh kegiatan kerja perusahaan, guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pelaksanaan pengawasan sangat penting agar segala proses kegiatan dapat terpantau dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu setiap organisasi baik pemerintahan, swasta maupun organisasi pengelola suatu proyek

harus melaksanakan pengawasan agar efektivitas dalam pengelolaan dapat tercapai.

Penelitian ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan internal. Menurut Handoko (2014:359) mendefinisikan bahwa “Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Artinya pengawasan internal dilaksanakan dari dalam organisasi, pengawasan ini sangat penting dilaksanakan agar dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan organisasi tersebut dalam mencapai efektivitas kerja yang optimal.

Pencapaian tujuan organisasi pemerintah yang berhasil guna dan berdaya guna diperlukan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, jujur, adil dan bekerja secara efektif. Pegawai dengan efektivitas kinerja yang tinggi dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Emerson yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Sedangkan menurut Pasolong “Teori Administrasi Publik (2011.175) tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Pengawasan dari dalam bertujuan agar hasil dari pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna. Hasil yang berdaya guna disebut dengan efektivitas, yaitu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yang berarti

suatu pelaksanaan pekerjaan dapat dinilai baik atau tidak bergantung pada penyelesaian tugas, tata cara pelaksanaan tugas, serta biaya yang telah digunakan.

Pengawasan dari dalam dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan dan hal lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan guna mendukung efektivitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu adanya peningkatan pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap seluruh pegawai di dalam organisasi pemerintah secara terus menerus dan menyeluruh untuk mencegah atau memperkecil penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian secara bertahap akan dapat diupayakan terwujudnya efektivitas kinerja yang tinggi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri dan produktif. Negara juga bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Penyediaan rumah layak huni dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun.

Kota Bandung adalah salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki program pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni bagi masyarakat umum yang termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bandung yang tersebar di 55 Kelurahan. Pembangunan rumah susun sederhana sewa di Kota Bandung dari sumber dana APBN dan APBD Kota diselenggarakan secara bertahap sejak tahun 2010 dan sampai saat ini telah terbangun dan dihuni rumah susun di 3 lokasi, salah satu diantaranya adalah rusunawa Cingised beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditugaskan untuk mengurusnya, termasuk para huniannya. atau tempat belanja untuk keperluan sehari-hari akan sangat membantu menyelesaikan masalah perkotaan, terutama yang menyangkut masalah transportasi dan lalu lintas kota. nantinya akan berkaitan erat dengan uraian kerja, rekrutmen, penempatan karyawan baru, stand hasil kerja, dan evaluasi.

Pembangunan rumah susun umum dengan sistem sewa atau rusunawa bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni serta terjangkau bagi MBR dikawasan perkotaan. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 54 ayat (1) Tentang Rumah Susun menyatakan bahwa :

“Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).”

Organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah susun sederhana sewa ini yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Cingised

Kota Bandung yang merupakan salah satu bagian dari susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

Dari beberapa teori dan konsep para ahli mengenai kedua variable penelitian ini, yaitu Pengawasan dan Efektivitas Kerja, penulis memaparkan sebuah teori penghubung yang menyatakan mengenai keterkaitan antara pengawasan dan efektivitas kerja. Soewarno Handyaningrat (1985:143) yaitu bahwa Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, pencapaian efektivitas kerja yang optimal sangat ditentukan oleh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala UPT Rusunawa Cingised Kota Bandung.

Berdasarkan observasi awal serta wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan permasalahan pada instansi tersebut yaitu pada indikator tujuan dan objektivitas, dilihat bahwa telah terjadi penyalahgunaan pemanfaatan rumah susun umum bagi MBR. Pengelola yang tugasnya untuk menjamin bahwa rumah susun umum hanya dapat dihuni oleh MBR, pada faktanya terdapat penghuni rumah susun umum yang bukan termasuk ke dalam golongan MBR atau dapat dikatakan mampu. Hal tersebut dapat dibuktikan karena telah ditemukan penghuni yang bukan termasuk kedalam golongan MBR dan memanfaatkan rumah susun umum ini sedangkan penghuni tersebut sudah memiliki hunian pribadi bahkan ada yang memiliki kendaraan roda empat.

Masalah selanjutnya ada pada indikator strategi yang terarah dan tetap, dilihat dari prosedur kerja pengolahan sampah harusnya memiliki beberapa proses, namun di pihak UPT sendiri tidak memiliki standar prosedurnya, sehingga kegiatan memprosesan sampah sering terhambat. Lalu juga terdapat situasi dimana petugas harus melakukan verifikasi pernyataan calon penghuni atau penghuni perihal apakah mereka memang tidak memiliki rumah, hanya saja aksi ini tidak terdapat di dalam SOP atau di uraian kerja, sehingga tidak dapat dilaksanakan semestinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya menjadi penelitian dengan judul : **“PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN PADA UPT RUSUNAWA CINGISED”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pengawasan internal terhadap efektivitas kerja pada pengelolaan Rusunawa Cingised Kota Bandung?
2. Faktor - faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengawasan internal untuk mencapai efektivitas kerja pada pengelolaan UPT Rusunawa Cingised Kota Bandung
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang berkenaan dengan pengaruh pengawasan internal terhadap efektivitas kerja pada Pengelolaan Rusunawa Cingised Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bahas. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh Pengawasan internal terhadap Efektivitas kerja pada pengelolaan Rusunawa Cingised Kota Bandung
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengawasan internal untuk mencapai efektivitas kerja pada pengelolaan UPT Rusunawa Cingised Kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang berkenaan dengan pengaruh Pengawasan internal terhadap Efektivitas kerja pada Pengelolaan Rusunawa Cingised Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam akademis yang berkaitan dengan Pengawasan Internal terhadap Efektivitas Kerja. Selain itu penelitian ini juga untuk mengembangkan studi Administrasi Publik.

2) Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat serta masukandalam meningkatkan Pengawasan internal untuk mencapai

Efektivitas kerja dalam pengelolaan rumah susun yang optimal bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Cingised Kota Bandung.